

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi Indonesia yang terletak pada pulau Jawa dengan ibu kota di Bandung. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki populasi tertinggi di Indonesia. Berdasarkan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kementerian Dalam Negeri, jumlah populasi mencapai 49,9 juta jiwa atau 17,78% dari jumlah penduduk masyarakat Indonesia pada tahun 2023. Provinsi Jawa Barat memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena provinsi ini terkenal dengan sumber daya alam yang kaya dan juga industri yang berkembang pesat yang membuat Provinsi Jawa Barat dikenal sebagai salah satu penyumbang terbesar terhadap PDB atau PDRB.

Menurut BAPPEDA Jawa Barat (2019), indeks pembangunan ekonomi di Provinsi Barat menunjukkan posisi yang cukup baik jika di bandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Pada tahun 2017 Provinsi Jawa Barat menunjukkan peringkat ke-12 jika dibandingkan dengan 34 provinsi lainnya. Meskipun Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan indeks pembangunan ekonomi inklusif yang cukup baik, akan tetapi ketimpangan di Provinsi Jawa Barat menunjukkan tantangan jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hal tersebut

dilihat dari indeks rasio gini di Provinsi Jawa Barat lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang memiliki ketimpangan lebih rendah. Di Provinsi Jawa Barat, kota-kota besar seperti Bandung dan Bogor mengalami pembangunan yang cepat, sementara daerah pedesaan masih menghadapi kesulitan dalam akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Selama dua puluh tahun terakhir, Provinsi mengalami pembangunan ekonomi yang signifikan meskipun terdapat tantangan yang besar dalam meningkatkan indeks pembangunan ekonomi inklusif, terutama indeks pembangunan ekonomi inklusifnya. Pada awal tahun 2000-an Provinsi Jawa Barat mengalami pembangunan ekonomi yang signifikan karena di dorong oleh perkembangan industri yang kuat dibidang manufaktur dan tekstil akan tetapi sempat mengalami krisis pada tahun 2008. Memasuki tahun 2010-an berhasil mengatasi krisis dengan menerapkan investasi, meningkatkan infrastuktur juga pengembangan UMKM. Setelah perkembangan yang signifikan pada awal tahun 2020, Indonesia khususnya Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan baru yaitu pandemi COVID-19. Hal itu menyebabkan penurunan ekonomi secara drastis. Akan tetapi pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi di Provinsi mulai signifikan kembali.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pertumbuhan ekonomi inklusif di suatu daerah atau wilayah yang berarti memberikan manfaat kepada seluruh anggota masyarakat, terutama mereka yang terpinggirkan. Salah satu tujuan utama dari indeks

pembangunan ekonomi inklusif fokus pada kebijakan yang dapat mengurangi ketimpangan masyarakat dan meningkatkan akses terhadap peluang ekonomi bagi semua kelompok. Indeks pembangunan ekonomi inklusif tidak hanya berfokus terhadap bagaimana kebijakan dapat terancang akan tetapi merupakan alat yang sangat penting dalam mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Ada berbagai konsep pengukuran dalam indeks pembangunan ekonomi inklusif dalam berbagai penelitian, namun utama dalam pengukuran ekonomi inklusif ini adalah pembangunan ekonomi yang merata. Dalam penelitian ini pengukuran yang digunakan yaitu ekonomi inklusif berdasarkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, Kemiskinan, Tingkat Pendidikan melalui data Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Hidup (AHH), Ketimpangan Ekonomi yang diukur melalui Indeks Rasio Gini (IRG) dan Investasi yang ada setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

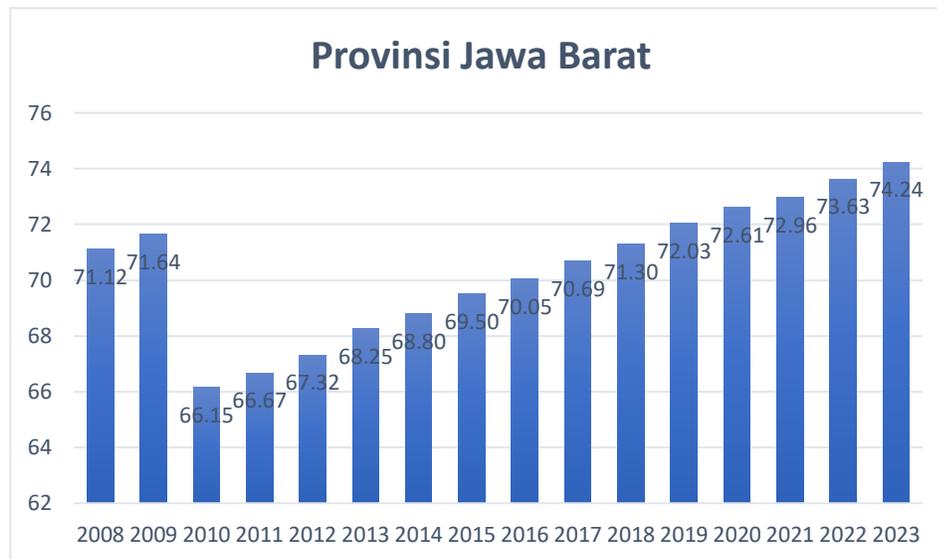
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan salah satu indikator atau alat ukur untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif pada suatu negara atau wilayah yang dapat memberikan manfaat pada seluruh lapisan masyarakat. Salah satu aspek penting dalam indikator ini adalah kesetaraan, pembangunan manusia, dan distribusi pendapatan. Dengan demikian, indikator indeks pembangunan ekonomi inklusif bertujuan menjadi salah satu alat ukur yang komprehensif dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi inklusif. Menurut Amartya Sen seorang ekonom dari India berpendapat bahwa indeks pembangunan ekonomi merupakan indikator yang membebaskan terhadap individu untuk berpartisipasi dalam ekonomi dan kehidupan sosial. Beliau juga berpendapat bahwa pembangunan sebagai kebebasan (*development*

as freedom), yang berarti pembangunan sejati adalah ketika setiap individu memiliki kebebasan untuk mencapai sesuatu yang mereka pilih dan nilai berharga mereka

Indeks pembangunan ekonomi inklusif sebagai alat untuk perekonomian yang inklusif yang berarti merata bagi seluruh kalangan masyarakat. Data yang dapat digunakan dalam mengukur indikator ini dapat melalui PDB atau PDRB, distribusi pendapatan dan juga indeks pembangunan manusia. Melalui indikator-indikator tersebut dianggap relevan dalam pengukuran indeks pembangunan ekonomi inklusif karena terdapat aspek-aspek penting dalam pembangunan ekonomi inklusif seperti kesehatan, pendidikan dan pendapatan.

Selama lima belas tahun terakhir indeks pembangunan ekonomi inklusif di Provinsi Jawa Barat mengalami kemajuan dan juga menghadapi berbagai tantangan. Pada tahun 2010-an upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi mulai dikembangkan melalui distribusi pendapatan dengan cara mengembangkan UMKM. Namun pada awal tahun 2020, pertumbuhan ekonomi inklusif yang mulai signifikan menjadi turun drastis karena adanya pandemi COVID-19. Karena krisis tersebut memberikan dampak terhadap pembangunan yang terhambat, krisis kesehatan dan krisis pendapatan. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi inklusif mulai meningkat pada tahun 2021, pertumbuhannya mulai menunjukkan trend positif mulai dibidang infrastruktur, pendapatan, tingkat pendidikan, dan kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat melalui data berikut :

**Gambar 1. 1 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Provinsi Jawa Barat
Pada Tahun 2008-2023 :**



Sumber data : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Dalam perkembangan pertumbuhan ekonomi inklusif di provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan juga penurunan selama dua puluh tahun terakhir. Terlihat pada data tergambar pada tahun 2008 sampai 2023 mengalami peningkatan yang signifikan. Akan tetapi mengalami kembali penurunan pada tahun 2010, lalu mengalami lagi peningkatan yang stabil hingga 2023 walaupun pada tahun 2020-2021 mengalami hambatan pandemi COVID-19.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang mengalami perkembangan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan signifikan. Perkembangan

pertumbuhan ekonomi inklusif di Provinsi Jawa Barat selama dua puluh tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tingkat kemiskinan yang terus menurun yang mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) data pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat tumbuh sebesar 5% untuk rata-rata pertahunnya. Akan tetapi pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan akibat COVID-19. Pertumbuhan ekonomi inklusif ini dipengaruhi oleh kemiskinan, tingkat pendidikan, angka harapan hidup, ketimpangan ekonomi dan investasi.

Pertumbuhan ekonomi wilayah akan dapat terus meningkat jika tingkat kemiskinan terus menurun. Apabila suatu wilayah dapat meningkatkan indeks pembangunan ekonomi inklusif secara merata, maka pembangunan ekonomi inklusif pada wilayah tersebut sudah dikatakan berhasil. Akan tetapi jika pembangunan ekonomi terus mengalami penurunan dan terus menghadapi tantangan secara terus menerus, maka hal tersebut akan terus menciptakan kemiskinan bagi masyarakat. Menurut Jeffrey Sachs, kemiskinan yang mendalam merupakan penghalang utama terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, karena hal tersebut menghalangi individu untuk berkontribusi secara produktif dalam masyarakat. Kemiskinan dalam arti luas dapat diartikan sebagai keterbatasan yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan serta dapat terancamnya hak dan keadilan.

Terdapat tiga faktor kemiskinan dalam sisi ekonomi. Faktor pertama, kemiskinan dapat muncul dikarenakan pola pemikiran sumber daya yang dapat menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang karena sumber daya yang terbatas dan juga kualitas yang rendah. Faktor kedua, kemiskinan dapat disebabkan oleh

kualitas sumber daya yang rendah hal itu karena pendidikan, produktivitas, dan upah yang rendah. Dan faktor ketiga, kemiskinan dapat disebabkan oleh perbedaan akses dalam modal yang rendah.

Data kemiskinan di Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2021-2023 mengalami penurunan secara bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara merata. Pada periode tahun 2021, presentase penduduk miskin sebesar 8,40% lalu mengalami penurunan secara bertahap pada tahun berikutnya yaitu tahun 2022 menjadi 8,06% dan pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali menjadi 7,62%.

Pendidikan memiliki peran yang penting terhadap dalam membentuk kemampuan sumber daya manusia dalam mengembangkan kemampuan agar terciptanya pertumbuhan dan pembangunan secara berkelanjutan. Pendidikan merupakan salah satu modal untuk pengembangan sumber daya manusia untuk memaksimalkan kualitas hidup sumber daya. Perkembangan pendidikan bisa diukur melalui variabel rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang di gunakan masyarakat untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Menurut *United Nations Development Programs* (UNDP) batas maksimum rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun atau setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan batas minimumnya adalah 0 tahun. Rata-rata lama sekolah merupakan cerminan dari pendidikan seseorang, semakin tinggi pendidikan seseorang maka makin tinggi juga tingkat kualitas seseorang.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), presentase pendidikan yang diukur melalui Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan secara bertahap selama periode tiga tahun terakhir. Pada periode tahun 2021, presentase rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Barat sebesar 8,61%. Lalu pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 8,78% dan pada periode tahun 2023 mengalami peningkatan kembali menjadi 8,83%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan.

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum kesehatan masyarakat pada khususnya. Melalui indikator angka harapan hidup mampu membantu pemerintah dalam membantu merancang kebijakan yang efektif untuk kesetaraan kesejahteraan bagi seluruh kelompok masyarakat. Menurut Rahmawati (2011), di setiap negara yang memiliki tingkat kesehatan yang baik cenderung memiliki angka rata-rata harapan hidup yang lebih lama, dan karena hal itu juga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan menjadi lebih meningkat.

Indonesia merupakan salah satu negara yang ada di tengah-tengah angka harapan hidup yang tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Angka harapan hidup di Indonesia sekitar 72 tahun, lebih rendah jika dibandingkan dengan negara lain seperti Jepang, Singapura dan Swiss mencapai angka diatas 80 tahun. Pada Provinsi Jawa Barat termasuk salah satu provinsi di Indonesia dengan angka harapan hidup yang relatif tinggi. Berdasarkan data terbaru, angka harapan hidup di Jawa Barat

mencapai sekitar 73 tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di Indonesia. Pada tahun 2021, angka harapan hidup Provinsi Jawa Barat sebesar 73,23% dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2022 menjadi 73,52% dan mengalami peningkatan Kembali menjadi 73,80%.

Pengertian ketimpangan ekonomi menurut Sukirno (2006), adalah konsep yang membahas tentang penyebaran pendapatan di antara individu atau rumah tangga dalam masyarakat. Sedangkan menurut Kuncoro (2006), ketimpangan ekonomi dapat diartikan sebagai standar hidup yang relatif bagi seluruh masyarakat yang disebabkan oleh kesenjangan antar wilayah yang diakibatkan perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Ketimpangan ekonomi dapat terjadi karena disebabkan oleh rendahnya produktivitas dan kebijakan distribusi keuangan korporasi yang condong pada *maximization shareholder value* atau bisa disebut dengan maksimalisasi nilai pemegang saham. Salah satu variabel yang dapat mengukur ketimpangan ekonomi adalah Indeks Rasio Gini (IRG).

Indonesia merupakan salah satu negara yang menghadapi dengan laju peningkatan ketimpangan ekonomi. Berdasarkan data badan pusat statistik yang diukur melalui indeks rasio gini. Data dari ketimpangan gender di Provinsi Jawa Barat selama 3 tahun terakhir yaitu mengalami peningkatan sedikit demi sedikit pada setiap tahunnya. Pada tahun 2021 indeks rasio gini sebesar 0,412 lalu mengalami kembali kenaikan pada tahun 2022 menjadi 0,417 dan pada tahun terakhir yaitu 2023 menjadi sebesar 0,425. Hal ini menunjukan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang mengalami peningkatan ketimpangan ekonomi.

Investasi dapat di definisikan sebagai proses merancang modal dengan tujuan mendapatkan hasil yang seimbang di masa depan. Kegiatan ini melibatkan pengeluaran uang atau sumber daya lainnya untuk membeli aset yang diharapkan akan meningkat nilainya..

Indeks rasio gini kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa jumlah investasi tertinggi terdapat pada Kota Bekasi dengan jumlah investasi sebesar Rp. 12.379.000 juta pada tahun 2023 dan kabupaten yang menunjukkan jumlah tahun terendah berada Kabupaten/Kota yaitu sebesar Rp.0 juta.

Latar belakang dari penelitian ini digunakan sebagai acuan untuk analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi inklusif di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada periode tahun 2008-2023. Pentingnya memahami faktor-faktor pembangunan ekonomi inklusif agar dapat menciptakan kesejahteraan ekonomi yang merata. Oleh karena itu, judul yang akan diteliti oleh penulis berjudul **“Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pendidikan, Angka Harapan Hidup, Ketimpangan Ekonomi dan Investasi terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi indeks pembangunan ekonomi inklusif, kemiskinan, tingkat pendidikan, angka harapan hidup, ketimpangan ekonomi dan investasi di setiap kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2023?

2. Bagaimana pengaruh kemiskinan, tingkat pendidikan, angka harapan hidup, ketimpangan ekonomi dan investasi terhadap kondisi indeks pembangunan ekonomi inklusif di setiap kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2023 secara parsial dan simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kondisi indeks pembangunan ekonomi inklusif, kemiskinan, tingkat pendidikan, angka harapan hidup, ketimpangan ekonomi dan investasi di setiap kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh kemiskinan, tingkat pendidikan, angka harapan hidup, ketimpangan ekonomi dan investasi terhadap kondisi indeks pembangunan ekonomi inklusif di setiap kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2023 secara parsial dan simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijabarkan oleh penulis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap pihak-pihak yang terkait. Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu manfaat teoritis dan praktis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini terdapat manfaat teoritis yang diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi pihak yang berkepentingan agar dapat memberikan pemahaman mengenai pembangunan ekonomi inklusif yang dipengaruhi oleh kemiskinan, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, ketimpangan ekonomi dan angkatan kerja di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, pada penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk acuan untuk masyarakat, pemangku kebijakan dan pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi inklusif agar kesejahteraan dapat terealisasi secara menyeluruh.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pendidikan, Angka Harapan Hidup, Ketimpangan Ekonomi dan Investasi terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat” memberikan manfaat secara langsung terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif di Provinsi Jawa Barat. Berikut beberapa manfaat praktis dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga Pendidikan

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan juga pemahaman yang bermanfaat bagi instansi atau lembaga yang sedang mengkaji dan sedang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan

indeks pembangunan ekonomi inklusif kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat

2. Bagi Instansi/Lembaga Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan referensi dan informasi yang relevan bagi instansi atau lembaga pemerintah terkait sebagai acuan untuk pembuatan kebijakan yang efektif dan relevan.

3. Bagi Masyarakat Daerah

Diharapkan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan baru terhadap masyarakat daerah tentang bagaimana pentingnya pembangunan ekonomi inklusif yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. Bagi Mahasiswa/ Mahasiswi

Adanya penelitian ini dapat dijadikan sebuah informasi, referensi serta acuan terkait indeks pembangunan ekonomi inklusif kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat guna mengkaji untuk penelitian yang akan diteliti atau dikaji lebih lanjut.

5. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi tantangan juga ilmu pengetahuan baru bagi penulis. Selain itu, melalui penelitian ini memberikan pemahaman baru terkait indeks pembangunan ekonomi inklusif khususnya kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.